

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andiza Candrika Maharani

NPP. 31.0818

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: andizadiza@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, S.H., M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The development of street children, homeless people and beggars by the Social Service is expected to be able to help the community to improve their special abilities and skills in order to have a decent living and work so as to reduce the number of street children, homeless people and beggars who are still active on the street. However, findings in the field show that this is not working perfectly. This can be seen from the number of street children, homeless people and beggars who are still active on the streets, which has increased since 2020. **Purpose:** This research aims to find out and analyze how the development of street children, homeless people and beggars is carried out by the Social Service in Makassar City. **Method:** The method used by researchers is a qualitative descriptive method using Miftah Thoha's coaching theory. The data collection technique for this research is through observation, documentation and interviews with various informants. **Results:** Development of street children, homeless people and beggars by the Social Service in Makassar City has carried out training by referring to Makassar City Regional Regulation Number 2 of 2008 to the maximum, although it is still constrained by facilities and infrastructure, lack of human resources and still lack of public awareness Makassar City in responding to this problem. **Conclusion:** The outline of this research is based on the concept of coaching by Miftah Thoha, coaching street children, homeless people and beggars by the Social Service in Makassar City to help people improve their quality of life through various guidance and skills so that they can have a decent life and not return to their activities on the streets.

Keywords: Street Children, Homeless, Beggars, Development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial diharapkan mampu membantu untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan ketetampilan khusus agar memiliki penghidupan dan pekerjaan yang layak sehingga dapat mengurangi angka anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beraktivitas di jalanan. Namun temuan di lapangan bahwa hal ini tidak berjalan sempurna. Hal ini dapat dilihat dari angka Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beraktivitas di jalanan yang mengalami peningkatan sejak tahun 2020. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Makassar. **Metode:** Metode yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif kualitatif dengan teori Pembinaan dari

Miftah Thoha. Teknik pengambilan data penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara berbagai informan. **Hasil/Temuan:** Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Makassar telah melaksanakan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 dengan maksimal, meskipun masih terkendala dengan sarana dan prasarana, kurangnya SDM serta masih kurangnya kesadaran Masyarakat Kota Makassar dalam menyikapi permasalahan ini. **Kesimpulan:** Garis besar penelitian ini berdasarkan konsep pembinaan oleh Miftah Thoha, pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Makassar membantu Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui berbagai bimbingan dan keterampilan sehingga memiliki kehidupan yang layak dan tidak Kembali beraktivitas di jalanan.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pembinaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya permasalahan sosial yang sering dijumpai di daerah perkotaan yaitu banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor mulai dari kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, minimnya lapangan kerja, lingkungan yang kurang kondusif, sosial budaya, Kesehatan, kemiskinan dan sebagainya. Salah satu permasalahan besar dalam kesejahteraan sosial adalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 26.36 juta jiwa. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menjadi sumber banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari keterbatasan Pendidikan, kurangnya keterampilan, potensi hingga lapangan pekerjaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”, Terkait dengan hal ini dijelaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta perhatian bagi fakir miskin dan anak terlantar, yang juga dimaksudkan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terbagi atas 26 jenis yang tercatat di Kementerian Sosial, Dimana anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga termasuk dalam golongan PMKS. Dengan adanya PMKS sudah jelas bahwa ini merupakan tugas pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Hal ini tentunya menyebabkan kesenjangan sosial dalam Masyarakat. Kesenjangan sosial yang terjadi ini mendorong seseorang menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis karena tidak mempunyai kehidupan yang layak serta menjadikan mengemis atau meminta minta di lingkungan Masyarakat dengan segala alasan dan caranya masing masing agar mendapat bantuan atau rasa iba dari Masyarakat umum sebagai mata pencaharian utama untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.

Kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar dengan penduduk terbanyak ke delapan di Indonesia berdasarkan data BPS, di Kota Makassar angka penduduk mencapai 1,427,619 orang pada tahun 2021. Dalam menangani hal ini, pemerintah telah memiliki

sebuah pedoman untuk menangani serta mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus bekerja sama dalam menangani permasalahan ini diatur dalam kebijakan yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Khusus Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah inilah yang menjadi dasar dalam meminimalisir sebab akibat dari aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang cenderung membahayakan diri sendiri maupun ketentraman dan ketertiban ditempat umum serta kenyamanan Masyarakat secara umum. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebutkan didalam peraturan daerah tersebut bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur didalam peraturan daerah tersebut dalam menangani permasalahan, serta melakukan pencegahan dan pembinaan tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut. Banyaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang beraktifitas di jalan jalan protokol Kota Makassar contohnya pada persimpangan jala, pusat perbelanjaan, lampu merah, khususnya dibawah fly over, dimana mereka memanfaatkan situasi dan kondisi jalanan tersebut untuk mengemis, dan mengamen sehingga menyebabkan keresahan bagi Masyarakat pengguna jalan. Dalam menangani permasalahan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 bahwa Dinas Sosial beserta OPD dan Instansi terkait memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun sejauh ini pelaksanaan dari tujuan kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Dinas Sosial Kota Makassar yang menunjukkan presentase jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini tentunya menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum dijalankan dan ditegakkan dengan baik di lapangan. Penegakan peraturan daerah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan agar dapat terwujudnya ketentraman dalam bermasyarakat. Selain itu penegakan peraturan daerah juga sebuah Langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib. Dengan penegakan peraturan daerah yang ada tentunya dapat mencegah segala potensi gangguan yang dapat mengancam serta memberikan pengaruh buruk dalam lingkungan Masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pokok permasalahan yang menjadi fokus oleh peneliti adalah mengetahui dan menganalisis Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Makassar dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana, kehandalan SDM,

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian Savana Endang Endarto yang berjudul Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang (Savana Endang Andarto, 2016) menemukan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berjalan dengan baik melalui penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan rehabilitasi melalui Panti Among Jiwo, yang tentunya berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.

Penelitian oleh Chairika Nasution, Husni Thamrin yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Pekerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan (Chairika Nasution, Husni Thamrin, 2016) menemukan bahwa Implementasi kebijakan program pembinaan Gepeng oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan belum berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial milik Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Medan, karena rumah yang selama ini digunakan adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maka dari dapat dikatakan bahwa belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien.

Penelitian Jonathan Tribuwono yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Jonathan Tribuwono, 2017). Menemukan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patroli PMKS Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen semakin meningkat dan bukti lainnya yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Besse Erniati yang berjudul Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar (Besse Erniati, 2019). menemukan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar, dari segi aplikasi sudah bisa digolongkan baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya berupa kurangnya tempat alokasi yang bisa menampung anak jalanan untuk melakukan pembinaan.

Penelitian Dyah Puspita Wijayanti yang berjudul Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar Dan Anak Jalanan Bagian Dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten (Dyah Puspita Wijayanti, 2022) menemukan bahwa upaya penanggulangan pgot dan anjal dibagi menjadi upaya preventif, represif, rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Hambatan penanggulangan pgot dan anjal meliputi keterbatasan sumber daya anggota Satpol PP, keterbatasan anggaran dan sarana mobilitas, tidak adanya panti sosial terpadu dan upaya mengatasi hambatan penanggulangan pgot dan anjal yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota Satpol PP, mengusulkan penambahan dana dan sarana mobilitas, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten membangun panti sosial terpadu

Penelitian Endang Sri Hidayah yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Endang Sri Hidayah, 2020) menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan belum berhasil dikarenakan masih adanya tujuan yang belum tercapai yang disebabkan oleh beberapa hambatan. Namun komunikasi antar organisasi antar Dinsos yang bekerja sama dengan satpol PP, YKP2N dan panti rehabilitasi sudah terlaksana cukup baik, namun lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat belum berperan aktif dalam membantu Pemkot menerapkan kebijakan ini.

Penelitian Hamsyukur yang berjudul Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Di Kota Makassar (Hamsyukur, 2014) menunjukkan bahwa: Bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, mencakup :Rehabilitasi sosial, pemberdayaan, bimbingan lanjutan, dan partisipasi masyarakat. Daya dukung yang dimiliki Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 yaitu tersedianya regulasi terkait dengan pembinaan anak jalanan.

Penelitian A.M. Ian Setiawan, Abdul Mahsyar, Nuryanti Mustari yang berjudul Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (A.M. Ian Setiawan dkk, 2023) menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu: pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan melakukan rehabilitas. Penelitian Azima Dimiyati yang berjudul Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (Azima Dimiyati, 2018) menemukan bahwa pelaksana kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial masih banyak terdapat berbagai permasalahan. Saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya, sebaiknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung lebih meningkatkan lagi komunikasi dalam mensosialisasikan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar masyarakat nantinya tidak memilih hidup dijalan.

Penelitian Putra Syarif Hidayatullah yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Surabaya (Putra Syarif Hidayatullah, 2022) menemukan bahwa UPTD Liponsos berhasil melakukan pembinaan yang cukup baik ditandai dengan adanya angka penurunan jumlah PMKS setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) kota Surabaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Liponsos kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah efektif. Adapun pelayanan yang diberikan sudah efektif dalam menangani masalah yang dialami PMKS.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan konsep pembinaan oleh Miftah Thoha untuk mengukur pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dalam menentukan informan dan memperoleh suatu data pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang dilaksanakan peneliti dalam melakukan pencapaian hasil penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui dan mampu mendeskripsikan

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan uraian-uraian secara verbal, seperti narasi-narasi bukan berupa angka-angka sebagai bahan pembenaran. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu peneliti ingin menunjukkan fakta yang terjadi dibalik fenomena secara mendalam, terperinci dan tuntas dari sumber data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan dengan menganalisis menggunakan konsep pembinaan oleh Miftah Thoha yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu: Usaha, Proses dan Pembaharuan dan telah dibahas dalam 3 Subbab berikut:

3.1 Usaha

Menurut Miftah Thoha (1989:60) Pembinaan secara umum adalah dengan menerapkan Tribina, yaitu Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Usaha. Bina usaha yang dimaksud adalah melatih suatu objek yang akan dibina, mulai dari perencanaan hingga tahap keberhasilan. Contoh dalam dimensi usaha dalam proses pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah berbagai upaya pendekatan dan program untuk membantu anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk keluar dari situasi yang rentan dan memberikan kesempatan untuk berkembang secara positif. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur dimensi usaha dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- **Memberikan Sosialisasi**

Sosialisasi dalam proses pembinaan sangat diperlukan sebagai Langkah awal dalam program pembinaan yang akan dilakukan, dikarenakan pada proses sosialisasi ini dapat membangun program pembinaan yang lebih terstruktur dan utuh. Dalam program sosialisasi dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Makassar melalui:

- A. Sosialisasi secara langsung
- B. Sosialisasi secara tidak langsung

Program sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial telah mengacu dan berdasar kepada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan rutin sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan mengundang anjal, gepeng, dan pihak keluarganya berdasarkan data penjangkaran dalam penertiban tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk menegaskan dan memberikan pemahaman secara langsung dan mendalam tentang perda yang berlaku. Selain itu Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu melalui Sosialisasi tidak langsung yang dilakukan melalui media sosial dengan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang perda yang mengatur serta sanksi yang berlaku.

Dinas Sosial dalam sosialisasi penyampaian informasi dan edukasi telah menjalankan program nya dengan sangat baik dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadi tahap awal dalam mengurangi jumlah anjal dan gepeng yang bertambah setiap tahunnya.

- **Menentukan Program**

Program pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial dan Pekerja Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah dijalankan secara terstruktur sesuai dengan Perda yang mengatur dan menjalin koordinasi dengan pihak OPD terkait untuk mendukung proses pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang lebih terstruktur. Koordinasi dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan anjal dan gepeng sangat diperlukan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan kedepannya. Koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Satpol PP, Polrestabes, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta RT, RW tempat tinggal anak jalanan tsb.

- **Menetapkan Upaya**

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Makassar Khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tentang adanya peraturan daerah yang mengatur, melakukan pendekatan kepada objek pembinaan hingga pemberian bimbingan keterampilan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu sendiri agar mereka tidak turun kembali melakukan aktivitasnya di jalan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui program pembinaan yang dilakukan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) oleh pekerja sosial dengan beberapa tahapan seperti:

- a. Engaged

Tahap engaged dilakukan kontak dan kontrak, dimana proses kontak dan kontrak ini menjadi tahap awal dalam proses pembinaan. Pada tahap engaged ini dilakukan kontak pertama kalinya kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan lalu dilakukan kontrak dimana proses kontrak ini meliputi assesment, pembacaan tata tertib dan peraturan selama dilaksanakan pembinaan. Assesment yang dilakukan oleh pekerja sosial ini merupakan tahap dimana dilakukan penilaian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis melibatkan informasi yang komprehensif dan sensitif untuk memahami kondisi mereka, kebutuhan mereka, serta potensi dan tantangan yang dihadapi.

- b. Bimbingan

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar ini melalui berbagai macam bimbingan yang dilakukan di rumah perlindungan center (RPTC) oleh pekerja sosial professional. Hasil assesment sebelumnya menjadi acuan untuk menentukan jenis bimbingan yang diperlukan oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu sendiri. Bimbingan terbagi atas beberapa jenis yaitu diantaranya adalah:

- Bimbingan Edukasi
- Bimbingan Sosial
- Bimbingan Spiritual
- Bimbingan Emosional

- Bimbingan Jasmani
- c. Pemberian Layanan
- Selama proses pembinaan yang dilakukan di RPTC, Dinas Sosial menyediakan berbagai layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan individu. Layanan yang dimaksud bisa mencakup layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan kependudukan, layanan psikososial dan layanan lainnya. Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa instansi untuk memberikan layanan agar pembinaan berjalan lebih maksimal.
- d. Memberikan pelatihan serta keterampilan
- Pemberian keterampilan dalam proses pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Makassar merupakan langkah penting untuk membantu mereka menjadi lebih produktif. Melalui proses identifikasi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat kembali ke masyarakat sesuai dengan lingkungan yang ada. Keterampilan yang dapat diberikan seperti:
- Keterampilan Pendidikan
 - Keterampilan Sosial
 - Keterampilan Pekerjaan
- Melalui pemberian bimbingan keterampilan yang tepat untuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

3.2 Proses

proses mengacu pada serangkaian langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan untuk memberikan bantuan, pengembangan, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang holistik dan terkoordinasi. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan intervensi, implementasi program-program pembinaan, pemantauan kemajuan, dan evaluasi hasil, dengan tujuan akhir memperbaiki kondisi hidup mereka dan memfasilitasi keberhasilan mereka di masa depan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur dimesi proses dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- **Melakukan Pendampingan**
Pendampingan yang dilakukan lebih berfokus untuk memberikan dukungan emosional, bimbingan personal, pembinaan keterampilan, motivasi dan advokasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pendampingan melibatkan interaksi yang lebih intensif antara pendamping, baik itu pihak Dinas Sosial ataupun pekerja sosial secara langsung kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dibimbing. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa sesi konseling, pembicaraan satu lawan satu atau pendampingan langsung dalam kegiatan pembinaan sehari-hari.
- **Melakukan Pemantauan**
Tujuan utama dilakukannya pemantauan adalah untuk memastikan bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, bahwa program-program pembinaan telah berjalan dengan baik, selain itu agar dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan untuk

meningkatkan efektivitas dari pembinaan yang dilakukan. Pengamatan tersebut dapat dilihat melalui perubahan perilaku, keterampilan yang dikuasai, dan pencapaian lainnya yang telah dicapai selama 3 hari.

Berdasarkan pernyataan dapat diketahui bahwa dengan dilakukannya pemantauan secara teratur, dinas sosial dapat memastikan bahwa upaya dan upaya pembinaan mereka berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapatkan kesempatan terbaik untuk dapat memperbaiki kondisi hidup dan memiliki masa depan yang lebih baik.

- **Melakukan Evaluasi**

Evaluasi dilakukan diakhir program pembinaan yang telah dilakukan, dimana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan, kelemahan dan kekuatan program pembinaan yang telah dilaksanakan, agar dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan program yang lebih baik, Hasil pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat di evaluasi melalui pengamatan terhadap kemajuan mereka dalam mengembangkan keterampilan, perubahan perilaku, dan pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan. mengenai evaluasi dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tentunya masih memiliki hambatan dalam proses pembinaan. Terdapat hambatan baik internal dan eksternal yang ditemukan selama proses pembinaan namun tetap memberikan dampak positif bagi mereka. Hambatan eksternal yaitu, banyaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tidak berdomisili di Kota Makassar, banyak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak kooperatif saat ditertibkan dan tidak mau dibina karena merasa nyaman dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil meminta-minta, Selain itu pihak Dinas Sosial juga menemukan hambatan dalam proses pendataan karena anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan saat razia tidak jarang sudah di data satu atau dua kali sebelumnya merupakan sebuah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Hambatan internal yang dihadapi yaitu dengan sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai, tetapi Dinas Sosial Kota Makassar tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pembinaan dan pelayanan yang terbaik.

3.3 Pembaharuan

Proses pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis diharapkan mampu memberikan sebuah pembaharuan yang berkelanjutan dalam aspek kehidupannya sehingga dapat membantu anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat terus berkembang dalam lingkungan yang terus berubah.

- **Idenifikasi Dampak dan Hasil Pembinaan**

Dalam konteks pembinaan anjal dan gepeng dampak dan hasil pembinaan diperlukan untuj memahami efektivitas serta perubahan yang terjadi setelah dilakukan intervensi atau program pembinaan yang diberikan. Bahwa dampak dari pembinaan yang telah dilakukan dilihat dari sikap dan perilaku anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang lebih baik, kemampuan keterampilan pendidikan yang dimiliki mengalami peningkatan, seperti membaca, menulis dan berhitung

serta bimbingan spiritual yang diberikan mampu membuat mereka mengetahui cara membaca kitab suci seperti Al-Quran serta tata berwudhu dan sholat bagi yang beragama islam. Hasil pembinaan yang dilakukan ini memberikan dampak yang besar bagi mereka untuk melanjutkan hidup mereka kedepannya. Selain itu dampak yang terjadi adalah berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikarenakan pihak Dinas Sosial melakukan patroli secara rutin dan pembinaan dilaksanakan secara maksimal

Berdasarkan hasil identifikasi dampak dan hasil yang dihasilkan dari program pembinaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa walaupun terjadi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi dengan pihak Dinas Sosial yang tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik mampu menghasilkan dampak positif terhadap kehidupan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Makassar, dengan fokus pada proses pembinaan yang dilakukan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial telah berdasar kepada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dan sudah berjalan baik, koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembinaan pun telah dilakukan dengan terstruktur namun masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembinaan yang lebih maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan, koordinasi pembagian tugas dan komunikasi antar instansi terkait sangat penting untuk memastikan pembinaan yang dilakukan berjalan dengan efektif. Walaupun dalam proses pelaksanaan pembinaan masih ditemukan hambatan internal maupun eksternal. Dimana hambatan internal yang di hadapi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan yang lebih maksimal, serta faktor eksternal dimana anjal dan gepeng sulit untuk ditertibkan jika dilakukan razia yang tidak jarang memicu kericuhan. Namun pihak Dinas Sosial Kota Makassar tetap memaksimalkan pembinaan yang dilakukan dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan mengupayakan peningkatan program pembinaannya agar tetap berjalan efektif sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kedepannya dan dapat mengurangi jumlah anjal dan gepeng yang beraktivitas di jalan sehingga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat dapat terwujud.

KESIMPULAN

Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka melalui berbagai program yang menyangkut bimbingan dan keterampilan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidupnya kedepan dengan mencari nafkah yang lebih baik dan tidak kembali melakukan aktivitas di jalan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi anjal dan gepeng yang telah menerima pembinaan. Hal ini dapat ditandai dengan data PMKS yang terjaring razia menunjukkan penurunan angka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dikarenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 14 Hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi seupa berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Endarto, S, A. 2016. *Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*. [Skripsi]. Kota Semarang (ID); Universitas Negeri Semarang.
- Wijayanti, D, P. 2022. *Penanggulangan Pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari Upaya Sapol PP Kabupaten Klaten*. [Jurnal]. Kabupaten Klaten (ID). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tribuwono, Jonathan. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar* (Studi Kasus Pada Dinas Sosial) [Skripsi]. Makassar (ID): Universtas Hasanuddin Makassar. <https://core.ac.uk/download/pdf/89565671.pdf>
- Erniati, B. 2019. *Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar* [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7205-Full_Text.pdf
- Nasution, C. Thamrin, H. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan*. Jurnal Administrasi Publik. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/415/282>
- Hamsyukur.2014. *Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Di Kota Makassar*. [Jurnal]. Kota Makassar (ID): Universitas Negeri Makassar. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebby/article/download/3665/2078>
- .M. Ian Setiawan, Abdul Mahsyar, Nuryanti Mustari, 2023. *Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar*. [Jurnal]. Kota Makassar (ID): Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/12109>
- Hidayah, E. S. 2020. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1103>
- Dimiyati, Azima. 2018. *Analisis Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan*

- Dan Pengemis Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*. [Jurnal]. Kota Bandar Lampung (ID); Universitas Bandar Lampung. <http://artikel.ubl.ac.id/index.php/LIT/article/view/1235/0>
- Hidayatullah, P. S. 2022. Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik* <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/216>
- Thoha, M. 2003. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Bulan September 2022*

